

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab ini akan membahas temuan-temuan dari penelitian sebelumnya serta konsep-konsep teori yang relevan dengan fokus penelitian:

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara	Zidan Patrio	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan teori keamanan maritim• Menggunakan metode kualitatif dalam penelitian	<ul style="list-style-type: none">• Dalam jurnal tersebut berfokus pada strategi utama yang diterapkan oleh BAKAMLA untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Sementara dalam penelitian saya berfokus pada upaya BAKAMLA sebagai Indonesia <i>Coast Guard</i> dalam mengamankan wilayah maritim di Natuna Utara.
2.	Kedudukan Badan Keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Muhammad Ilham,	<ul style="list-style-type: none">• Membahas tentang BAKAMLA	<ul style="list-style-type: none">• Pada jurnal tersebut lebih fokus

	Laut (BAKAMLA) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Nirwan Moh. Nur, • Nasrun Hipan 	<p>sebagai lembaga penegak hukum di wilayah laut Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<p>terhadap kedudukan dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia sementara penelitian saya berfokus pada upaya BAKAMLA sebagai Indonesia <i>Coast Guard</i> dalam menjaga keamanan wilayah maritim di Natuna Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori yang digunakan dalam jurnal tersebut ialah hukum maritim sedangkan penelitian saya menggunakan teori keamanan maritim.
3.	Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • T.Mas Turi • Aries Sudiarto • I Wayan Warka 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai Upaya BAKAMLA menjaga keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tersebut mencakup implementasi pengamanan

	Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia		maritim di laut Indonesia <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode penelitian kualitatif 	laut oleh Bakamla di wilayah laut Indonesia, sedangkan penelitian saya hanya membahas di wilayah Natuna Utara. <ul style="list-style-type: none"> Artikel ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dan teori strategi sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi peran (BAKAMLA)
4.	Peran dan Hambatan BAKAMLA Menjaga Laut Natuna Utara Di Era Joko Widodo	<ul style="list-style-type: none"> M. Habib Pashya, Gufon Gozali, Nurul Faqiriah, Yeta Purnama 	<ul style="list-style-type: none"> Membahas tentang peran BAKAMLA dalam menghadapi sengketa maritim Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Pada penelitian tersebut berfokus pada menganalisis tantangan dan strategi yang dihadapi Bakamla dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia sementara penelitian saya berfokus

				<p>pada upaya BAKAMLA sebagai Indonesia <i>Coast Guard</i> dalam menjaga keamanan wilayah maritim di Natuna Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian ini pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sedangkan penelitian saya pada periode 2020-2024
5.	Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut China Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Luh Gde Citra Sundari Laksmi, • Dewa Gede Sudika Mangku, • Ni Putu Rai Yuliartini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan teori keamanan maritim • Menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini lebih berfokus faktor-faktor penyebab sengketa di Laut China Selatan serta upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa tersebut, sementara pada penelitian saya berfokus pada lembaga BAKAMLA

				dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Natuna Utara.
6.	Peran Indonesia Dalam Hukum Laut Internasional Guna Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Wilayah Laut Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ema Nurhayati, • Eva Arief 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut • Menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada jurnal ini lebih berfokus pada kontribusi Indonesia dalam pengembangan hukum laut internasional • Pada penelitian saya menggunakan teori Keamanan Maritim sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ema dan Eva menggunakan teori Hukum Laut.
7.	Review Strategis Upaya Pengamanan Laut Nasional Menuju Keamanan Maritim dan Pengelolaan Ruang Laut Indonesia	Okol Sri Suharyo, Avando Bastari	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti pembajakan, pencurian sumber daya alam, dan kejahatan lintas negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian kali ini berfokus pada peran strategis Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dalam penegakan

			<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<p>hukum di perairan Indonesia dan upaya menjaga keamanan maritim, penelitian saya berfokus pada upaya BAKAMLA sebagai Indonesia <i>Coast Guard</i> dalam menjaga keamanan wilayah maritim di Natuna Utara.</p>
8.	<p>Intelijen Strategis BAKAMLA RI dalam Melaksanakan Kolaborasi Institusi Keamanan Maritim untuk Ketahanan Nasional</p>	<p>Muhammad Sutisna</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan laut, termasuk ancaman non-militer 	<ul style="list-style-type: none"> Pada artikel ini membahas peran BAKAMLA dalam menjaga keamanan maritim Indonesia melalui kolaborasi dengan institusi lain seperti TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Bea Cukai, tetapi tidak spesifik ke wilayah Natuna Utara.

9.	Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina Di Laut Natuna Utara Di Masa Kepemimpinan Joko Widodo	<ul style="list-style-type: none"> • Nuans Asa Septari B, • Gistyger Hasudungan Manullang, • Aura Fatimah Azzahra S, • Bernadine Grace Alvania M, • Gracella Martauli Lumbantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori keamanan maritim • Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian tersebut membahas tiga respon utama Indonesia terhadap ancaman Tiongkok di Laut Natuna Utara selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, (diplomasi pertahanan, meningkatkan kekuatan militer, arbitrase internasional sebagai langkah hukum)
10	Strategi Operasi Kolaborasi TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut RI dalam Pengendalian Laut di Laut Natuna Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Bagus Badari Amarullah • Suhirwan • Sutanto 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara, termasuk kehadiran kapal asing dan penangkapan ikan ilegal. • Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada artikel tersebut membahas kolaborasi yang solid antara TNI AL dan Bakamla akan meningkatkan efektivitas pengendalian laut dan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna Utara, sementara penelitian saya

				berfokus pada BAKAMLA dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Natuna Utara.
--	--	--	--	---

Pertama, penelitian yang berjudul **“Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara”** yang ditulis oleh Zidan Patrio membahas pada tiga strategi utama yang diterapkan oleh Bakamla untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peralatan Bakamla, yang mencakup pelatihan personel dan pengadaan kapal patroli. Kedua, melibatkan instansi lain dalam operasi dan latihan bersama untuk mengatasi kekurangan SDM dan alutsista. Ketiga, pengerahan partisipasi masyarakat secara langsung, termasuk pembentukan kelompok nelayan lokal yang berfungsi sebagai pengawas di laut. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap upaya Bakamla dalam menjaga keamanan di wilayah yang strategis dan kaya sumber daya tersebut.

Kedua, penelitian yang berjudul **“Kedudukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia”** yang ditulis oleh Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur dan Nasrun Hipan. Penelitian ini berbicara tentang posisi Bakamla sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui kementerian yang mengatur penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Studi ini menjelaskan wewenang Bakamla untuk mengejar, memeriksa, menangkap, dan menyerahkan kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Penelitian ini juga membahas bagaimana sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut harus diintegrasikan, serta bagaimana berbagai instansi penegak hukum harus bekerja sama untuk menjaga keamanan maritim Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran lengkap tentang fungsi Bakamla dalam melindungi kedaulatan dan keamanan laut Indonesia.

Ketiga, penelitian yang berjudul **“Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia”** yang ditulis oleh T. Mas Turi, Aries Sudiarto dan I Wayan Warka. Penelitian ini membahas implementasi pengamanan laut BAKAMLA, yang mencakup operasi laut dan udara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor penghambat yang diidentifikasi termasuk anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang terbatas, serta kemungkinan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain. Sebaliknya, elemen pendukung seperti sistem peringatan dini, kegiatan patroli bersama, dan legalitas hukum juga disebut sebagai bagian penting dari meningkatkan kinerja BAKAMLA. Akibatnya, penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana BAKAMLA memastikan keselamatan dan keamanan perairan Indonesia.

Keempat, penelitian yang berjudul **“Peran dan Hambatan BAKAMLA Menjaga Laut Natuna Utara di Era Joko Widodo”** yang ditulis oleh M. Habib Pashya, Gufron Gozali, Nurul Faqiriah, dan Yeta Purnama. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada peran penting BAKAMLA dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terutama dalam menghadapi aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan oleh kapal asing. Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun BAKAMLA memiliki mandat untuk melakukan patroli dan penegakan hukum di wilayah tersebut, institusi ini menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan anggaran, tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain, dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Penulis menyoroti bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memperkuat BAKAMLA melalui peraturan presiden dan peningkatan kapasitas, tantangan yang ada masih mempengaruhi efektivitas operasional BAKAMLA. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar Bakamla dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.

Kelima, penelitian berjudul, **“Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut China Selatan”** yang ditulis oleh Luh Gde Citra Sundari Laksmi, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab sengketa di

Laut Cina Selatan, termasuk klaim teritorial yang tumpang tindih antara negara-negara di kawasan tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa internasional. Penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia berusaha untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan dengan mengedepankan diplomasi dan kerjasama multilateral, terutama melalui ASEAN. Penulis juga menyoroti pentingnya penguatan posisi Indonesia sebagai negara *non-claimant* dalam konflik ini, serta perlunya membangun kepercayaan antara negara-negara yang terlibat. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang damai dan berkelanjutan di Laut Cina Selatan. Studi ini juga menekankan bahwa untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, Indonesia harus mengikuti hukum internasional.

Keenam, penelitian berjudul, **“Peran Indonesia Dalam Hukum Laut Internasional Guna Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Wilayah Laut Indonesia”** yang ditulis oleh Ema Nurhayati dan Eva Arief. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada kontribusi Indonesia dalam pengembangan hukum laut internasional, terutama melalui partisipasinya dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan Deklarasi Djuanda 1957. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjaga kedaulatan dan mengelola sumber daya lautnya secara berkelanjutan merupakan kepentingan strategis, menurut penelitian ini. Penulis menekankan bahwa, setelah diakui sebagai negara kepulauan, Indonesia berhasil memperluas wilayah lautnya, termasuk landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penelitian ini juga membahas masalah keamanan maritim Indonesia, seperti pelanggaran wilayah oleh kapal asing dan kejahatan transnasional. Penelitian ini menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia dan mewujudkan impian sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.

Ketujuh, penelitian berjudul, **“Review Strategis Upaya Pengamanan Laut Nasional Menuju Keamanan Maritim dan Pengelolaan Ruang Laut Indonesia”** yang ditulis oleh Okol Sri Suharyo dan Avando Bastari. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada berbagai ancaman yang dihadapi Indonesia di

laut, seperti pembajakan, pencurian sumber daya alam, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menghadapi ancaman tersebut, Indonesia telah mengembangkan strategi pengamanan yang melibatkan berbagai instansi, termasuk TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan kepolisian. Penulis menekankan betapa pentingnya bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menjalankan patroli dan penegakan hukum di perairan Indonesia, serta betapa pentingnya memperkuat kapasitas dan sumber daya untuk mendukung operasi keamanan maritim. Penelitian ini juga membahas masalah implementasi strategi tersebut, seperti sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa, di tengah meningkatnya ancaman di wilayah perairan, memperkuat strategi pengamanan laut nasional sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

Kedelapan, penelitian berjudul, **“Intelijen Strategis BAKAMLA RI dalam Melaksanakan Kolaborasi Institusi Keamanan Maritim untuk Ketahanan Nasional”** yang ditulis oleh Muhammad Sutisna. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada peran BAKAMLA RI dalam menjaga keamanan maritim Indonesia melalui kolaborasi dengan institusi lain seperti TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai. Penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi berbagai ancaman non-militer seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan *human trafficking* yang memerlukan kerjasama antar lembaga untuk mengatasi. Penulis menyoroti pentingnya sinergi antara BAKAMLA dan institusi lain dalam melakukan patroli dan penegakan hukum di perairan Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kolaborasi tersebut, seperti tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi yang efektif antara BAKAMLA dan institusi keamanan maritim lainnya sangat penting untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Kesembilan, penelitian berjudul, **“Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina Di Laut Natuna Utara di Masa Kepemimpinan Joko Widodo”** yang ditulis oleh Nuans Asa Septari B, Gistyger Hasudungan Manullang, Aura Fatimah Azzahra S, Bernadine Grace Alvania M, dan Gracella Martauli Lumbantoruan. Penelitian ini membahas tiga tanggapan utama yang diberikan

Indonesia terhadap ancaman Tiongkok di Laut Natuna Utara selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama, Indonesia melakukan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan kerjasama maritim dengan negara-negara seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Kedua, ia meningkatkan kekuatan militernya dengan meningkatkan posisi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU), serta mendirikan pangkalan militer di Kepulauan Natuna. Ketiga, Indonesia juga menggunakan arbitrase internasional sebagai langkah hukum untuk menanggapi klaim Tiongkok. Penelitian ini menekankan bahwa langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan di Laut Natuna Utara, serta menegaskan posisi Indonesia yang tegas terhadap klaim sepihak Tiongkok.

Kesepuluh, penelitian yang berjudul **“Strategi Operasi Kolaborasi TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut RI dalam Pengendalian Laut di Laut Natuna Utara”** yang ditulis oleh Bagus Badari Amarullah, Suhirwan dan Sutanto. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara, termasuk kehadiran kapal asing dan penangkapan ikan ilegal. Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun TNI AL dan BAKAMLA memiliki tugas yang berbeda, kolaborasi yang efektif antara keduanya sangat penting untuk meningkatkan pengendalian laut. Penulis menguraikan strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kerjasama, seperti peningkatan komunikasi, berbagi informasi, dan pelaksanaan operasi bersama. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya pengembangan kapasitas dan sumber daya untuk mendukung kolaborasi yang lebih baik dalam menghadapi ancaman di Laut Natuna Utara. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara TNI AL dan BAKAMLA akan meningkatkan efektivitas pengendalian laut dan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.

Namun masih sangat sedikit penelitian yang secara mendalam mengulas peran BAKAMLA sebagai institusi *coast guard* nasional dalam periode pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) 2016. Khususnya, kajian yang secara spesifik menempatkan BAKAMLA dalam konteks pengamanan wilayah Natuna Utara sebagai respon strategis atas meningkatnya pelanggaran yurisdiksi di

wilayah tersebut masih terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang penting untuk diisi guna memahami bagaimana Indonesia melalui BAKAMLA memproyeksikan kehadiran negara, menegakkan hukum laut, dan mempertahankan kedaulatan maritim di Kawasan Natuna Utara yang strategis dan rawan konflik ini.